
Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung

The role of civil service police units in fostering juvenile/student delinquency in Tulungagung Regency

Angkasawati¹, Rinawati²

^{1,2} Universitas Tulungagung, Jl. Ki Mangun Sarkoro Beji, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Indonesia

angkasawatiangkasawati@gmail.com

rinasandrika@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Tulungagung salah satu bagian Propinsi Jawa Timur dimana penduduknya selain mata pencaharian sebagai petani, juga dikenal daerah konveksi pakaian batik, baik pakaian dalam juga industri krupuk. Bahkan dikenal juga yang bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Dengan berjalannya waktu dan teknologi digital yang semakin menggoda kalangan terutama anak remaja. Hal tersebut semakin menambah problematika remaja/pelajar. Hal tersebut menjadikan kekhawatiran dengan berbagai bentuk kenakalan maupun sikap perilaku anak remaja yang menyimpang dari etika/norma-norma yang seharusnya.

Tujuandari penelitian ini untuk memberikan gambaran ini bagaimana Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif.

Dari hasil Peranan Satuan Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung berhasil dengan baik melalui koordinasi, kerjasama, sosialisasi, penertiban, rasia, bimbingan dan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa Dinas Industri pihak terkait.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam Peranan Satuan Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar yaitu faktor yang pendukung dan faktor yang penghambat. Faktor yang pendukung peranan Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar antara lain : sumber daya manusia, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Kata Kunci : Peranan, Satuan Pamong Praja, Kenakalan Remaja/Pelajar.

ABSTRACT

Tulungagung Regency is one of the parts of East Java Province where Thepopulation besides their livelihoods as farmers, it is also known as a batik clothing convection area, both underwear and the cracker industry. It is even known that those who work as migrant workers abroad.

With the passage of time and digital technology that increasingly seducescircles, especially teenagers. This further adds to the problems of adolescents / students. This raises concerns with various forms of delinquency and adolescent attitudes that deviate from the proper ethics / norms.

The purpose of this study is to provide this description of how the Satpol PP in the development of juvenile / student delinquency in Tulungagung Regency. This study uses a qualitative descriptive research method.

From the results of the role of the Civil Service Unit in the Guidance of Juvenile / Student Delinquency in Tulungagung Regency, it was successful through coordination, cooperation, socialization, restraint, secrecy, guidance and coaching by the Civil Service Police Unit and several related party Industry Offices.

Several factors that influence the Role of Civil Service Units in the Development of Delinquency for Youth / Students, namely supporting factors and inhibiting factors. Factors that support the role of Satpol PP in coaching juvenile / student delinquency include: human resources, and the Tulungagung Regency Government.

Keywords: Role, Civil Service Unit, Juvenile / Student Delinquency.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman dari hari ke hari membawa perubahan pola dan gaya hidup manusia. Apalagi dengan kemajuan teknologi media sosial akan membawa pengaruh khususnya dikalangan remaja/anak didik usia pelajar.

Salah satu kunci keberhasilan adalah kesuksesan dalam dunia pendidikan sebagaimana dikatakan Driyakarya dalam buku ilmu pendidikan sebagaimana diutarakan Driyakarya dalam buku ilmu pendidikan (2011:01) bahwa pendidikan merupakan gejala semesta dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun manusia berada selain itu menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaran, akhlak, mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pendidikan, remaja/pelajar adalah umumnya mulai dari tingkatan sekolah pertama (SMP) sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA) sangat memerlukan pengaruh sama yang khusus karena diusia tersebut sangat riskan. secara psikologi usia remaja merupakan usia yang banyak perubahan, baik sikap, tutur kata, marah/mental akan sangat berpengaruh dalam membentuk pribadinya.

Remaja/pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewarnai sekaligus merubah Indonesia kedepannya lebih maju dan berkembang.

Peran orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam mendidik anak usia remaja/pelajar untuk terus memberi motivasi, bimbingan, saran yang positif. Akan tetapi dalam perjalanannya akan muncul masalah yang menghambat keberlangsungan dalam menata keinginan/cita-cita mereka dalam memupuk pendidikan.

Banyak remaja/anak usia didik yang memiliki problematik, sehingga banyak yang lari ke arah pergaulan yang salah sebagai pelampiasan kekecewaan yang dialami dalam kehidupannya.

Faktor lingkungan keluarga maupun dalam memilih teman dalam pergaulan yang salah/kurang tepat sangat berpengaruh seperti dikatakan psikolog Adelina Syarief, M.Psi bahwa : remaja/pelajar yang melakukan perilaku menyimpang dalam hal ini melakukan kenakalan disebabkan bisa dari diri sendiri atau lingkungan seperti orang tua yang terlalu sibuk, kurangnya komunikasi atau perceraian.

Begitu pula Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) juga menemukan bahwa jumlah pengguna narkoba sebesar 1,5% dari populasi remaja/pelajar Indonesia yang mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3,2 juta orang. Ini merupakan rapor buruk bagi dunia pendidikan Indonesia, seperti : bolos sekolah, merokok, pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Kurangnya perhatian orang tua di rumah, belum optimalnya sekolah dalam mendidik/mengajar pelajar/remaja serta pengaruh lingkungan. Hal ini campur tangan Pemerintah, dalam Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk membantu kepala daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk dalam membina / mengatasi kenakalan-kenakalan remaja/pelajar.

Oleh karena Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sering berhubungan dengan sekolah-sekolah untuk terus mengawasi setiap kegiatan pelajar diluar sekolah seperti kegiatan pembinaan kepada pelajar yang melakukan perbuatan menyimpang yang mengganggu masyarakat.

Kepala BNNK Tulungagung Djoko Purnomo mengatakan bahwa : Kabupaten Tulungagung khususnya Kecamatan Ngunut tergolong salah satu wilayah darurat narkoba terkait dengan itu pihaknya meminta kepolisian dan pihak terkait untuk lebih gencar mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba yang sudah menyasar kalangan remaja/pelajar.

Dengan penduduk yang banyak bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh bagi remaja/pelajar sekaligus sangat riskan dengan berbagai bentuk kenakalan maupun perilaku menyimpang yang membuat orang tua/masyarakat resah terhadap perilaku anak remaja/pelajar tersebut.

Dengan kondisi masyarakat seperti itu mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada para remaja/pelajar yang rata-rata sedang mencari identitas diri sehingga banyak ditemukan seperti para remaja/pelajar menjadi perokok aktif. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik sebenarnya karena rokok merupakan salah satu zat adiktif sebagai awal kenakalan remaja yang lanjut seperti narkoba.

Banyaknya jenis narkoba yang beredar di pasaran membuat pemberantasan narkoba sulit dilakukan. Meluasnya peredaran narkoba ke daerah-daerah /di Jawa Timur seperti Tulungagung tentunya merupakan sinyal buruk bagi perkembangan pembangunan khususnya kedepannya berpengaruh bagi anak didik usia remaja. Hal ini tentunya semakin merisaukan masyarakat dan

merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan bangsa dan masa depan anak usia remaja/pelajar.

Untuk itu perlu adanya penanganan yang berkesinambungan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dapat menghindari para remaja dan pelajar dari penyalahgunaan baik narkoba ataupun penyimpangan lainnya.

Begitu pula HIV/AIDS, di Kabupaten Tulungagung sesuai temuan Voluntary Counselling and Testing (VCT) di RSUD dr. Iskak maupun Puskesmas Campurdarat serta kegiatan pemeriksaan keliling yang dilakukan petugas kesehatan jumlah kasusnya terus menambah.

Hal tersebut diatas merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan lain yang sering terlihat di kota Tulungagung yang dilakukan anak usia remaja maupun pelajar adalah bolos sekolah. Mereka keluyuran di warung-warung kopi, cafe, ditempat-tempat kost/hiburan ataupun di lokasi pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung. Yang sangat memprihatinkan disaat jam belajar sekolah.

Sesuai tugas dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja maka tim Satpol PP menyaring beberapa pelajar yang ditemukan sedang berada di dalam kamar kost untuk diamankan.

Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan seperti itu diharapkan peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi permasalahan - permasalahan sekaligus pembinaan terhadap remaja atau anak didik/pelajar sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat orang tua menjadi resah dan tentunya masyarakat juga terganggu dengan kenakalan-kenakalan yang diperbuat anak-anak remaja terkhusus anak didik/pelajar yang terjadi kota Tulungagung.

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagai aparatur pemerintah daerah dalam penegakan peraturan-peraturan daerah dan sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kenakalan remaja/anak didik/pelajar yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan bisa dibina dan diamankan dengan diberikan arahan-arahan dan pembinaan, masyarakat akan tentram, merasa aman dan tentunya tidak terganggu dan kota serta lingkungan menjadi lebih tertib.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan mengambil judul **“PERANAN SATUAN PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN KENAKALAN REMAJA/ PELAJAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja / pelajar di Kabupaten Tulungagung ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengidentifikasi dan memahami peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung
3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung.

KERANGKA TEORI

A. Peranan

Kata peranan berasal dari kata “peran” yang memiliki makna yaitu seperangkat tingkat keinginan yang diinginkan dan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Seringkali peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seseorang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007).

Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang dimaknai “person ask or duty in undertaking” artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peranan bisa dimaknai sebagai aspek dinamis dari posisi atau kedudukan. Bisa diberikan ilustrasi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka yang bersangkutan telah menjalankan suatu peranan. Tegasnya peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut di dalam masyarakat.

B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian Satpol PP

Dalam buku peraturan Mendagri tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah (2013:4).

Dengan ini peran Satpol PP sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Satpol PP dalam memberikan rasa nyaman ini Satpol PP melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. Maka dari itu penegakan yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dimana pada jalur yang tepat sebagai aparatur pemerintah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram.

Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

- a. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja

Dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Buapti/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Era zaman now bahkan kedepan peranan Satuan Polisi Pamong Praja semakin strategis dan harus ditingkatkan kinerja sesuai tuntutan / perkembangan zaman dengan keterbatasan kemampuan, jumlah personil, anggaran yang dimiliki, Satpol PP harus semakin taktis dan terus memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pembinaan pada masyarakat.

Sering dijumpai pelajar yang bolos sekolah, bermain play station/videogames di warnet, warkop, berpacaran di lokasi wisata dengan masih mengenakan seragam sekolah, bahkan tawuran antar pelajar. Semua itu akan meresahkan masyarakat, karena tindakan pelajar tersebut tidak mencerminkan budi pekerti dan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan etika sopan santun di masyarakat.

Masyarakat berharap dapat menjadi generasi muda yang berilmu pengetahuan (iptek) yang tinggi, beriman dan bertaqwa (imtaq), bertata krama serta berbudi pekerti yang baik.

Satpol PP di Kabupaten Tulungagung telah mengupayakan duduk bersama dengan para guru, para Wakil Kepala Sekolah, para guru BK (Bimbingan Konseling) untuk bersama-sama memberikan pembinaan, tindakan pencegahan dan perilaku pelajar dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan terhadap remaja/pelajar di wilayah Kabupaten Tulungagung.

3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut :

- a. Tugas yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan.
- b. Sedangkan, Fungsi Satpol PP adalah :
 - 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penegakkan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
 - 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - 5) Pelaksanaan koordinasi ke menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
 - 6) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan tugas Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas, maka kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dari Agus Tri Widiarto (2014) mengatakan bahwa salah satu faktor tentang kenakalan remaja di era pembangunan salah satunya adalah faktor lingkungan masyarakat yaitu faktor lingkungan diluar lingkungan keluarga dan sekolah sangat berpengaruh kuat terhadap perjudian dikalangan remaja. Lingkungan masyarakat dapat dilihat melalui kontrol masyarakat terhadap perilaku asusila yang dilakukan oleh warga sekitar dan pergaulan dengan teman-temannya, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan dari pihak pemerintah / satpol PP untuk membina para remaja.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif menjadi desain dan metodologi pilihan dalam penelitian ini. Metode kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung (Djunaidi dan Fauzan, 2014:51)

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah meliputi :

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan Satpol PP dalam melakukan Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dengan cara mengadakan pengamatan dan peneliti dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian yaitu deskriptif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci

mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa di generalisasikan.

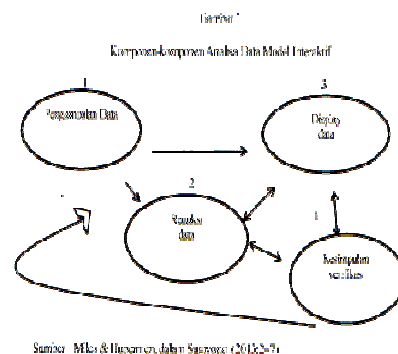
Menurut Bogdan dan Sugiono (2013:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiono (2013:88) menyatakan bahwa teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan.

Data-data yang sudah terkumpul dipergunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dari data tersebut peneliti berusaha untuk menganalisis supaya bisa memperoleh arti dan makna peranan satuan Polisi Pamung Praja dalam kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung.

Teknik analisa data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah model interaktif menurut Miles and Huberman yang dikutip dari Sugiono (2008:337).

Selanjutnya akan ditunjukkan pada gambar berikut ini :



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah tidak perlu.

Dengan demikiandata yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Verifikasi/Kesimpulan

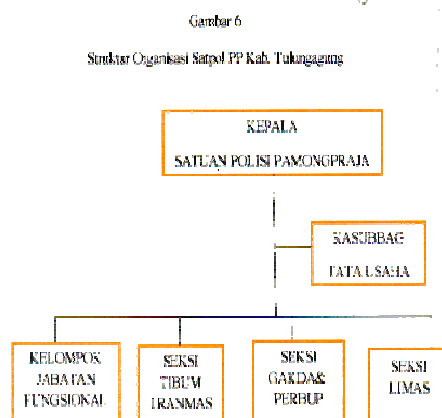
Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Walaupun kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung kedudukan dan susunan organisasinya adalah berada di bawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekretaris Daerah (SEKDA) Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Tulungagung terbentuk semenjak tanggal 3 maret 1950 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota ketertiban Umum (TIBUM) dan anggota Satuan Tugas Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat itu dibawah Matrik Hansip, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu di bawah nama Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Tulungagung.



B. KEADAAN PELAJAR/REMAJA DI TULUNGAGUNG

Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung terdapat 543 sekolah formal di seluruh penjuru Kabupaten Tulungagung. Dengan uraian Sekolah Dasar (SD) terdapat 432 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 73 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 23 sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel I Data Jumlah Sekolah:

Tabel I
Data Jumlah Sekolah

Jenjang	Jumlah sekolah
SD	432
SMP	73
SMA	15
SMK	23
Jumlah	543

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tulungagung

Sedangkan jumlah pelajar atau siswa menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun ajaran 2018/2019 terdapat 121.421 pelajar atau siswa dari jenjang SD sampai SMA/SMK. Dimana dengan rincian jumlah pelajar SD 80.483, SMP 24.548, SMA 5.267, dan SMK 11.123.

Hal itu lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Data Jumlah Sekolah

Jenjang	Jumlah sekolah
SD	80.483
SMP	24.548
SMA	5.267
SMK	11.123
Jumlah	121.421

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tulungagung

C. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja / Pelajar di Kabupaten Tulungagung

Sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai usaha-usaha dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti yang tertera dalam Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berbunyi :
“Visi Satpol PP yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan-peraturan Daerah dan Kepala Daerah”

Memperhatikan Visi tersebut diatas, yang menjadi tugas Satpol PP sangatlah luas dan berat dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Salah satu dari tugas berat tersebut adalah melakukan pembinaan kenakalan remaja / pelajar di Kabupaten Tulungagung.

Kenakalan remaja/pelajar di wilayah Kabupaten Tulungagung memang sangatlah kompleks. Satpol PP Kabupaten Tulungagung melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar/remaja yang melakukan kenakalan pelajar pada jam sekolah berlangsung. Kegiatan pembinaan dan bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

Peranan Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koordinasi/Kerjasama

Dalam rangka menjalankan perannya menangani problematika remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung, Satpol PP melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Koordinasi dan kerjasama terkait penanganan dan pembinaan terhadap pelajar/remaja yang dilakukan Satpol PP dilakukan dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dians Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, BNN Tulungagung dan nantinya juga dirintis dengan dinas dan instansi yang lain.

Untuk menangani para pelajar/remaja yang melakukan kenakalan/bolos sekolah ditempat umum, Satpol PP berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan tujuan untuk mengambil langkah dan menindaklanjuti terhadap pelajar-pelajar yang melakukan kenakalan.

Sesuai hasil wawancara anggota Satpol PP dalam melakukan operasi HP di sekolah mengatakan bahwa salah satu kenakalanremaja/pelajar sekarang kebanyakan memanfaatkan waktu bolosnya dengan menggunakan HP yang isinya film porno, juga ada yang merokok, ada yang minum-minuman keras bahkan ada yang dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu dalam dosis berlebihan.

Hal senada diungkapkan juga oleh salah satu masyarakat yang punya usaha play station dalam hasil wawancaranya bahwa sering remaja/pelajar/ anak didiksekolah bolos sekolah bermain PS, juga bolos di taman kota, terminal, warkop, tempat kost dan sebagainya.

Untuk itulah peran Satpol PP dalam pembinaan sangat diperlukan agar pelajar/remaja tidak terjerumuskan dalam kenakalan yang akan mengganggu ketentraman bagi masyarakat dan tentang orang tua juga khawatir dengan anak-anak didik kita khususnya di usia remaja.

Langkah awal yang dilakukan Satpol PP sebelum melakukan pembinaan didahului dengan penertiban pelajar/remaja yang terus-menerus dilakukan secara rutin. Dengan penertiban diharapkan pelajar/remaja bisa mengetahui atau sadar diri bahwa yang dilakukan merupakan

kesalahan dan akan merugikan diri sendiri. Apalagi mereka kebanyakan usia pelajar/anak didik. Semua itu akan mengganggu proses pembelajaran dengan bolos sekolah.

Kenakalan seperti berada di kamar kost dengan tingkah yang tidak sopan dengan merokok bahkan melakukan sampai bebas akan mengganggu ketentraman lingkungan tentunya mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya.

Begitu pula tawuran yang sering dilakukan akan mengganggu ketentraman masyarakat maupun lingkungan sekolah. Tentunya akan meresahkan masyarakat terlebih bagi orang tua yang anak-anaknya terlibat kenakalan-kenakalan yang mengakibatkan bisa merenggut nyawa seseorang.

Dengan melihat kenyataan tentang kenakalan anak usia remaja/anak didik seperti tersebut maka peran Satpol PP dalam menangani beberapa kenakalan tersebut sangat diperlukan.

Dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP sangat membantu sekolah-sekolah untuk memantau pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Kasat Satpol PP di sela-sela operasi di salah satu warkop, mengatakan bahwa penertiban pelajar dengan tujuan untuk mengurangi pelajar yang sering keluar disaat jam-jam pelajaran berlangsung. Hal tersebut di jumpai saat operasi pelajar/anak didik berada di warkop, ada yang ditempat-tempat umum.

2. Sosialisasi/pengarahan

Sosialisasi pengarahan kepada anak didik/pelajar perlu diadakan agar para pelajar/remaja jangan sampai kena pengaruh negatif yang akan menjerumuskan masa depan anak-anak usia remaja/pelajar.

Dengan kegiatan ini juga mengundang dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, BNN yang semua itu untuk mengurangi pelajar/remaja yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah dan tantangan agar kenakaan anak usia remaja ataupun pelajar bisa berkurang bahkan berharap tidak ada tindakan-tindakan anak remaja/pelajar yang membuat atau meresahkan bagi masyarakat, sekolah dan tentunya bagi orang tua.

Kegiatan sosialisasi pengarahan terhadap anak remaja/pelajar di sekolah-sekolah sudah teragendakan bahan dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut sesuai yang disampaikan Sekretaris Satpol PP dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa "Program ini sudah berjalan kira-kira kurang lebih 4 tahun terakhir kerjasama dengan kepolisian dan BNN memberikan pengarahan/sosialisasi dan diupayakan kegiatan tersebut dilakukan terus menerus dan terjadwal di sekolah-sekolah di kawasan wilayah Kabupaten Tulungagung"

Bahkan kegiatan pembinaan, penertiban terhadap anak remaja/pelajar yang dilakukan Satpol PP sesuai peran Topoksinya diharapkan dapat mengurangi berbagai kenakalan yang sering dilakukan oleh pelajar/remaja khususnya di Kabupaten Tulungagung. Dan tentunya situasi

pembelajaran anak didik/remaja/pelajar di wilayah Kabupaten Tulungagung akan tenang, aman dan tentram.

3. Penertiban/rasia

Satpol PP bersama dengan dinas dan instansi terkait telah tergabung dan bekerjasama dalam tim secara terpadu melakukan penertiban/rasia terhadap remaja/pelajar yang melakukan beberapa kenakalan yang melanggar.

Masyarakat sangat mendukung dengan adanya kegiatan rasia/penertiban tersebut apalagi para orang tua anak didik. Karena dirasa sangat positif untuk kelangsungan kegiatan penertiban/rasia terhadap para anak didik/remaja, maka kegiatan rasia tersebut harus terus dilaksanakan, karena dengan begitu Satpol PP dalam menjalankan kegiatan ini mendapat dukungan masyarakat baik secara moril maupun non moril terlebih pihak sekolah-sekolah. Kedepannya anak remaja/pelajar kita menjadi lebih berkualitas.

Untuk itu perlu adanya koordinasi dan saling berkomunikasi antara Satpol PP, terkait dalam pelaksanaan kegiatannya agar semuanya dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Dengan begitu pihak sekolah dapat mengetahui bahwa ada pelajar/remaja yang melakukan tindakan/kenakalan-kenakalan yang tak sepatutnya. Sekolah yang bersangkutan dapat menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan di sekolah masing-masing.

4. Pembimbingan

Langkah selanjutnya setelah penertiban/rasia, peran Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan kenakalan pelajar/remaja dengan melakukan pembimbingan. Dimana kegiatan pembimbingan terhadap para pelajar/remaja harus dilaksanakan secara rutin. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ketua seksi Tribun Transmas Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam kutipan wawancara dengan peneliti, mengatakan dari Satpol PP mencermati beberapa tahapan yang telah dilalui bersama-sama dengan dinas terkait realita yang terjadi hampir tiap hari kenakalan remaja/anak didik/pelajar terus terjadi, maka dirasa perlu untuk melakukan terus-menerus tindakan yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah pada jam-jam proses pembelajaran berlangsung.

Data kenakalan remaja / pelajar dalam kegiatan pembimbingan/pembinaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Kenakalan Remaja Tahun 2019

No.	Bulan	SMP	SMA/SMK	Jenis kenakalan
1	Mar	6	22	Membolos
2	April	5	3	Membolos
3	Sept	22	16	Membolos
4	Okt	4	6	Membolos
5	nop	12	4	Membolos
Jumlah		49	57	Total : 100

Dengan melihat data tersebut kenakalan remaja/pelajar cukup mengkhawatirkan. Kenakalan yang sering terjadi pada anak usia didik/remaja di Kabupaten Tulungagung adalah membolos sekolah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja / Pelajar di Kabupaten Tulungagung

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung dan peran Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung.

a. Sumber Daya Manusia

Hal ini bisa dilihat adanya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak seperti keterlibatan dalam kegiatan pembinaan kenakalan remaja pihak terkait seperti : BNN, Kepolisian, Kemenag dan Instansi lain.

b. Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP untuk berperan aktif dalam pemberian kenakalan remaja.

2. Faktor Penghambat

a. Jumlah Personil

Walaupun jumlah personil Satpol PP terbatas untuk mengatasi hambatan tersebut apalagi dalam situasi covid-19 ini, dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan agak terhambat, karena dalam situasi pandemi ini kenakalan-kenakalan remaja/anak didik justru lebih sering terjadi.

b. Sarana Prasarana

Kendala/hambatan yang terasa ialah dengan tidak tepatnya waktu dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Kurangnya sarana prasarana, seperti kendaraan operasional terbatas, alat komunikasi, seperangkat prasarana tersebut jadwal kegiatan akan terganggu.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP.

c. Anggaran

Masalah ketersediaan anggaran tentunya akan berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan/pembinaan Satpol PP dalam menangani kenakalan yang dilakukan oleh pelajar/remaja di Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Satpol PP bahwa ketersediaan dana/anggaran seringkali tidak sesuai dengan pengajuan anggaran.

Namun demikian, pihak Satpol PP tetap melaksanakan kegiatan terkait pembinaan/pembinaan terhadap kenakalan remaja/pelajar tetap berjalan sesuai jadwal dengan menyesuaikan dana yang ada/terbatas.

KESIMPULAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung berjalan dan berhasil dengan baik. Peranan yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

Adapun kegiatan pembinaan kenakalan remaja/pelajar yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan beberapa langkah yaitu :

- a. Koordinasi/kerjasama
- b. Sosialisasi/pengarahan
- c. Penertiban/rasia
- d. Pembimbingan/pembinaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung yaitu :

- a. Faktor pendukung
 1. Sumber daya manusia
 2. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- b. Faktor penghambat
 1. Jumlah personil
 2. Sarana dan prasarana
 3. Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

-
- Aip Badrujaman. (2011). *Teori dan Alikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*. Jakarta : Pt Indeks
- Anas Salahudin. (2012). *Bimbingan & Konseling*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Anton Saputro. (2015). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta. Laporan Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Arik Restu Cahyo Susilo. (2013). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya. Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Malang
- Bambang Nugroho. (2004). *Bimbingan Sosial TKSM Modal Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Replikasi)*. Jakarta : Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
- Dwi Kiswoyo dkk. (2008). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Hamid Darmadi. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- John W. Santrock. (2007). *Remaja*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Istian Hermawati. (2001). *Metode dan Teknik Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Adecita Karya Nusa
- Makalah Diklat Teknis Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar Angkatan IV (2002) Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mohammad Ali & Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mohammad Ali & Mohammad Asrori. (2008). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang *pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang *Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang *Sistem Kesehatan Nasional*
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang *Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah*
- PP RI No. 6 Tahun 2010 Pasal 6
- Rita Eka Izzaty, dkk. (2013). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta : UNY Press
- Sarlito W. Sarwono. (2006) *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sarwono Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
Bandung : Alfabeta
- Y.B. Mulyono (1989). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya.*
Yogyakarta Penerbit Kanisius.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional